

PROSEDUR PENGADAAN BARANG PADA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN Mendukung KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Restani Rizki¹, Hendri Gunawan², Diana Widhi Rachmawati³

¹Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang, Kota Palembang

*restanirizki@gmail.com, jayasampurna85@gmail.com, dianawidhi72@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang merupakan kegiatan penting dalam mendukung kinerja lembaga pemerintahan, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional. Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana prosedur pengadaan barang dilaksanakan serta jenis data administrasi apa saja yang dikumpulkan dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan dokumen administrasi, pemesanan melalui sistem *e-procurement* atau *e-purchasing*, penerimaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, hingga pengarsipan dan inventarisasi barang menggunakan sistem *e-BMD*. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses inventarisasi digital yang memerlukan penyesuaian dari sumber daya manusia. Kesimpulannya, pengumpulan data administrasi yang terstruktur dan sistematis sangat berperan dalam mendukung kelancaran pengadaan barang, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, serta menunjang penyusunan laporan keuangan dan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: pengadaan barang; barang milik daerah; administrasi pengadaan; e-procurement; akuntabilitas

Abstract

Procurement of goods is an essential activity in supporting the performance of government institutions, particularly in the provision of facilities and infrastructure that support operational activities. The Equipment Subdivision of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of South Sumatra Province plays a strategic role in the procurement of regional government assets, which must be conducted in an orderly, transparent, and accountable manner. The issue addressed in this study concerns how procurement procedures are implemented and what types of administrative data are collected throughout the process. This study employs a descriptive research design with a qualitative approach, utilizing direct observation, interviews, and documentation conducted during an internship at the Equipment Subdivision of the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province. The results indicate that procurement procedures have been implemented in accordance with applicable regulations, beginning with the planning stage, preparation of administrative documents, ordering through e-procurement or e-purchasing systems, receipt of goods evidenced by an Official Handover Report, and concluding with the archiving and inventory of goods using the e-BMD system. Nevertheless, several challenges were identified in the digital inventory process, particularly those requiring adjustments in human resources. In conclusion, structured and systematic administrative data collection plays a crucial role in ensuring the smooth implementation of procurement activities, enhancing the accountability of regional asset management, and supporting the preparation of reliable and accountable financial and asset reports.

Keywords: *procurement of goods; regional government assets; procurement administration; e-procurement; accountability.*

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah kegiatan strategis yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional instansi, tetapi juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan pada peraturan

yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, mutu administrasi pengadaan sangat memengaruhi suksesnya pengadaan dan ketepatan laporan keuangan serta aset daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan adalah perangkat daerah yang memainkan peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Salah satu unit yang ada dalam sekretariat ini adalah Subbagian Perlengkapan, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penyediaan perabot untuk rumah dinas pimpinan DPRD. Proses pengadaan dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kota Palembang, yang berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan provinsi.

Pengadaan perabot rumah dinas sebagai bagian dari BMD memerlukan pengelolaan administrasi yang teratur dan sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, pelaksanaan pengadaan, sampai penyerahan barang dan penginventarisasian aset. Barang Milik Daerah sendiri didefinisikan sebagai semua barang yang diperoleh dengan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dengan cara lain yang sah, yang harus dikelola berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakteraturan dalam administrasi bisa menyebabkan masalah dalam pemeriksaan, pelaporan keuangan, dan pengawasan aset daerah.

Dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan pengadaan dan aset pemerintah telah berubah dari metode manual ke sistem digital, termasuk dengan penerapan e-procurement dan aplikasi inventarisasi Barang Milik Daerah berbasis elektronik, seperti e-BMD. E-procurement dianggap dapat memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan karena semua proses tercatat secara digital dan dapat dilacak (4,5). Di sisi lain, sistem informasi untuk inventarisasi BMD bertujuan menyediakan data aset yang akurat, terkini, dan terintegrasi untuk mendukung administrasi yang baik dan pengambilan keputusan manajerial.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengadaan dan inventarisasi digital masih menemui berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan dokumen administrasi, serta konsistensi dalam penerapan prosedur yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan kajian mengenai prosedur pengumpulan data administrasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik yang terjadi di lapangan.

Dengan latar belakang ini, kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengadaan barang dan jenis data administrasi yang dikumpulkan di Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pengelolaan administrasi pengadaan barang milik daerah serta menjadi referensi bagi pengembangan praktik pengadaan dan pengelolaan aset pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

2. METODE

Pada Bagian 2 METODE, uraikan secara jelas dan ringkas aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jelaskan secara jelas alat ukur yang digunakan, misalnya kuesioner atau kuis (pertanyaan singkat). Akan lebih baik jika metode yang digunakan dapat mengukur hasil kegiatan sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Objek yang diukur dapat berupa perubahan pengetahuan atau literasi materi pengabdian, kondisi lingkungan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 1, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Dalam struktur organisasinya, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD untuk pemerintah daerah. Kegiatan ini difokuskan pada Subbagian Perlengkapan, yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan barang, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan administrasi, dan penginventarisasian barang daerah. Keberadaan subbagian ini menjadikannya lokasi yang tepat untuk pelaksanaan pengabdian yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan administrasi pengadaan barang sesuai dengan regulasi yang ada.

Sumber Data Manusia yang bertugas di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Subbagian Perlengkapan terdiri dari 13(Satu) Sumber Daya Manusia. Rincian sebagai berikut: 1(Satu) Orang kepala subbagian perlengkapan, 1(Satu) Penelaah Teknis kebijakan pada subbagian perlengkapan, 1(Satu) Pengelola layanan operasional pada subbagian perlengkapan, 4(Satu) Pengadministrasi perkantoran pada subbagian perlengkapan, 5(Satu) orang penata layanan operasional pada subbagian perlengkapan, 1(Satu) orang operator sistem informasi pemerintah daerah (SIMDA).

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses administrasi pengadaan barang serta meningkatkan pemahaman pegawai yang terlibat. Kegiatan ini dimulai dengan persiapan yang meliputi pengamatan kondisi lapangan, identifikasi alur administrasi pengadaan barang, dan penyesuaian materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan Subbagian Perlengkapan. Setelah itu, pelaksanaan dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas administrasi pengadaan barang melalui tahap perencanaan, pemesanan, penerimaan barang, hingga pengarsipan dokumen. Di samping itu, pendampingan dan diskusi dilakukan dengan pegawai Subbagian Perlengkapan untuk menjelaskan alur pengadaan, fungsi masing-masing dokumen administrasi, serta kesesuaian implementasinya dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini juga mencakup penelaahan dokumen pendukung seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan data inventaris barang milik daerah yang tercatat dalam sistem e-BMD.

Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, beberapa alat ukur digunakan dalam pengumpulan data. Pengamatan dilakukan menggunakan lembar observasi untuk mencatat kesesuaian prosedur administrasi pengadaan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, Pertanyaan singkat diberikan kepada pegawai untuk mengetahui pemahaman tentang prosedur pengadaan barang, jenis dokumen administrasi yang digunakan, serta proses inventarisasi barang milik daerah sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan dilakukan. Wawancara singkat juga dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi pengadaan barang dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Data hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran lengkap mengenai pelaksanaan administrasi pengadaan barang serta hasil kegiatan di Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan (Manajemen et al., 2022). Barang Milik Negara/Daerah mencakup barang yang diperoleh atau dibeli melalui badan APBN/APBD; barang yang berasal dari sumber lain yang sah, seperti hibah atau sumbangan, dari kontrak atau perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang, atau barang yang diperoleh melalui keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.(Study, 2021)

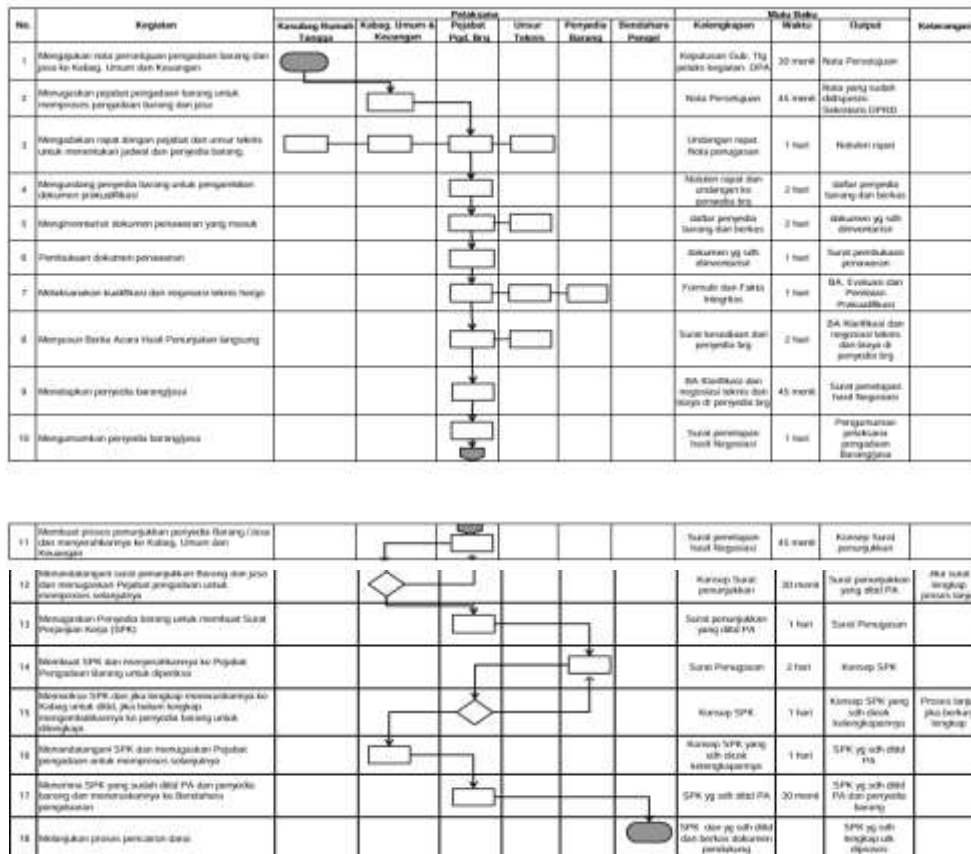
Di zaman sekarang, pengadaan oleh pemerintah semakin sering dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik seperti *e-procurement* atau *e-purchasing*. (Dari, 2015). *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik, sehingga semua langkah termasuk pemesanan, pendaftaran, penawaran, evaluasi, dan perjanjian dapat dilakukan secara daring melalui platform seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dengan adanya sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan semua data tersimpan dalam format digital yang bisa diperiksa kembali jika dibutuhkan.(Hardjanto & Winarno, 2015).

Sebelum melaksanakan kegiatan utama, penulis melakukan pengamatan awal untuk menilai kesesuaian antara program kerja Subbagian Perlengkapan dan praktik pengadaan barang yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan terhadap alur administrasi pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penginventarisasian barang. Hasil dari observasi mengungkapkan bahwa Subbagian Perlengkapan telah menyusun alur kerja yang jelas dengan merujuk kepada peraturan yang ada. Dokumen perencanaan, seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), telah disiapkan sebelum pelaksanaan proses pengadaan. Selain itu, pembagian tugas juga dilakukan secara terstruktur antara penelaah teknis kebijakan, pengelola administrasi, dan operator sistem.

Setelah mengumpulkan data awal, kegiatan dilanjutkan dengan observasi langsung atas pelaksanaan pengadaan barang. Proses pengadaan dilaksanakan melalui sistem elektronik (e-procurement/e-purchasing) dengan tujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pada tahap ini, penulis mengamati proses pemesanan barang kepada penyedia, pengecekan kecocokan spesifikasi barang dengan dokumen kontrak, serta pencatatan administrasi yang menyertainya. Sebuah pengamatan menunjukkan bahwa setiap langkah dalam pengadaan didukung oleh dokumen resmi seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan, dan dokumen pemilihan penyedia.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi atau pengukuran akhir yang dilakukan dengan membandingkan kondisi administrasi sebelum dan sesudah proses pengadaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian prosedur serta kelengkapan data administrasi yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah proses pengadaan dilaksanakan, data administrasi menjadi lebih lengkap dan terorganisir, terutama setelah barang diterima dan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) BAST ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan rencana dan kontrak yang telah disepakati dengan penyedia. Dengan demikian, administrasi pengadaan mencakup keseluruhan siklus mulai dari data perencanaan hingga bukti serah terima. (Ilmu et al., n.d.) serta diinput ke dalam sistem e-BMD. Ini menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan mampu mendukung keteraturan administrasi dan pengelolaan aset daerah.

Keberhasilan kegiatan pengadaan barang di Subbagian Perlengkapan dievaluasi melalui beberapa indikator, antara lain: Kesesuaian Prosedur: Semua langkah pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada, Kelengkapan Dokumen: Tersedianya dokumen administrasi pengadaan yang lengkap, dari perencanaan hingga serah terima barang, Ketepatan Inventarisasi: Barang yang diterima telah tercatat dan diinventarisasikan dalam sistem e-BMD, serta Transparansi dan Akuntabilitas: Adanya dokumentasi fisik dan digital yang dapat ditelusuri untuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, berdasarkan indikator tersebut, proses pengadaan barang dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut gambar Rincian pengadaan barang/jasa:



Gambar 1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					
Pekerjaan : Pengadaan Ambal Masjid Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan					
Anggaran : APBD Tahun 2025					
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	PPN 12%	Jumlah
1	Sajadah Al NIMA 100% pp Heaset Warna Hijau Lancet 30mm 1.500.000 Points Total Weight 4200Gr	334 M	Rp532.500	####	Rp 199.197.600
TOTAL					Rp 199.197.600
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah					
Palembang, 19 Februari 2025 Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan					
H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si Pembina Utama Muda (P/1)					

Gambar 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Gambar 2. merupakan contoh dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). merujuk pada estimasi biaya barang atau jasa yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kepatutan harga penawaran dan/atau kecocokan harga per unit(Ermelia & Soemitra, 2022). Dokumen ini umumnya mencakup rincian mengenai barang yang dibutuhkan, kuantitas, dan tanggal yang diinginkan, serta berfungsi sebagai langkah pertama dalam proses pengadaan sebelum penerbitan surat perintah pembelian atau *purchase order*.(Nurjannah et al., 2024)



Gambar 3. Website eBMD

Setelah Barang diterima dan Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) langkah berikutnya yaitu Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD (Permendagri 47 Tahun 2021). Tujuan inventarisasi adalah agar tersedianya data barang milik daerah secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.(Dahlan et al., 2024). Dengan adanya sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan semua data tersimpan dalam format digital yang bisa diperiksa kembali jika dibutuhkan.(Hardjanto & Winarno, 2015). Penelitian

sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman tentang prosedur perencanaan merupakan elemen kunci dalam melaksanakan pengadaan yang efektif karena dokumen perencanaan berfungsi sebagai landasan untuk tahapan-tahapan berikutnya dalam siklus pengadaan. (Alexandri & Halimah, 2021). Sehingga jika penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara/daerah tidak sesuai dengan laporan keuangan (Minabari et al., 2025).

Hasil dari aktivitas ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan memiliki beberapa keuntungan. Pengamatan langsung memungkinkan penulis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pengadaan barang, sedangkan wawancara memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan kebijakan internal. Penggunaan dokumentasi memperkuat keabsahan data melalui bukti berupa tulisan dan gambar. Walaupun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan aktivitas ini. Salah satunya adalah terbatasnya waktu pengamatan yang membuat tidak semua langkah pengadaan dapat diperhatikan secara rinci. Di samping itu, penggunaan sistem e-BMD masih membutuhkan penyesuaian dari beberapa karyawan, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam memasukkan data.

Beberapa tantangan yang dihadapi selama kegiatan, antara lain kurangnya akses ke beberapa dokumen internal dan perbedaan pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem digital. Kendala-kendala ini memberikan pelajaran penting bagi pihak lain yang ingin melaksanakan kegiatan serupa dengan mitra yang berbeda, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan dukungan sistem informasi. Secara umum, temuan dan analisis ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang di Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang prosedur pengadaan barang di Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kesimpulan dapat diambil bahwa proses pengadaan barang telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengadaan dimulai dengan perencanaan kebutuhan, pengorganisasian dokumen administrasi seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian dilanjutkan dengan pemesanan serta pelaksanaan pengadaan lewat sistem elektronik, sampai pada penerimaan barang yang dicatat dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyimpanan dokumen pendukung. Tipe data administrasi yang dikumpulkan dalam proses pengadaan barang meliputi data perencanaan, data pelaksanaan pengadaan, serta dokumen pendukung seperti kontrak, faktur, dan bukti pembayaran. Keteraturan dan kelengkapan data administrasi ini sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan penggunaan anggaran daerah, serta membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan aset. Kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Subbagian Perlengkapan telah menggunakan sistem digital dengan aplikasi e-BMD. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keteraturan administrasi dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, meskipun masih terdapat masalah teknis dan kebutuhan untuk beradaptasi bagi pengguna. Secara keseluruhan, pengumpulan dan pengelolaan data administrasi yang terorganisir mendukung kelancaran proses pengadaan, meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, dan memberikan kontribusi besar terhadap penyusunan laporan keuangan serta aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan sumbangan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis menyampaikan rasa syukurnya kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terutama Subbagian Perlengkapan, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang serta melakukan observasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai dan staf Subbagian Perlengkapan yang telah memberikan bimbingan, informasi, serta pertolongan selama proses kegiatan berlangsung. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas PGRI Palembang, khususnya kepada

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atas dukungan akademis, pembinaan, dan fasilitas yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan jurnal ini dengan baik. Penulis tidak melupakan untuk mengungkapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta semua pihak lain yang telah memberikan masukan, dorongan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan kegiatan dan penyusunan jurnal ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan administrasi pengadaan barang dan pengelolaan aset daerah, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, m. B., & halimah, m. (2021). *Barang dan jasa pemerintah di dinas kesehatan kabupaten bandung*. 4(1), 13–22.
- Dahlan, f. A., runtun, t., mawikere, l. M., akuntansi, j., ekonomi, f., ratulangi, u. S., & kampus, j. (2024). *Evaluasi penatausahaan barang milik daerah (bmd) berdasarkan permendagri nomor 47 tahun 2021 pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi sulawesi utara evaluation of the administration of regional property (bmd) based on permendagri number 47 of 2021 at the regional development planning agency of north sulawesi province*. 8(1), 101–112.
- Dari, i. E. D. (2015). *Ditinjau dari kesuksesan sistem teknologi informasi dengan menggunakan model delone dan mclean*. *Xviii*(1), 61–82.
- Ermelia, t., & soemitra, a. (2022). *Optimizing the preparation of your own estimated price with a reasonable profit procurement of goods / services for the mayor of binjai mengoptimalkan penyusunan harga perkiraan sendiri dengan profit yang wajar pengadaan barang / jasa walikota binjai*. 3(3), 795–802.
- Hardjanto, k., & winarno, w. W. (2015). *Persepsi dan perilaku organisasi pada skpd dalam pelaksanaan e-procurement di kota magelang*. 4(3).
- Ilmu, s., negara, a., ilmu, f., & surabaya, u. N. (n.d.). *Lingkungan hidup dan pangan kabupaten magetan raffa weybi andio eva hany fanida*. 1011–1022.
- Manajemen, a., fadhil, m., & dwiharyadi, a. (2022). *Analisis faktor-faktor kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan permendagri nomor 47 tahun 2021 perihal pemanfaatan aplikasi e-bmd dalam pengelolaan barang milik daerah kota bukittinggi*. 17(2), 41–57.
- Minabari, f., sabijono, h., kindangen, w. D., dalam, m., nomor, n., di, t., pertanian, d., dan, k., kota, p., minabari, f., sabijono, h., & kindangen, w. D. (2025). *Analysis of administration of regional property based on minister of home affairs regulation number 47 of 2021 at dinas pertanian , kelautan and perikanan manado city jurnal emba vol . 13 no . 1 januari 2025 , hal . 01-09*. 13(1), 1–9.
- Nurjannah, e. F., andayani, s., gubeng, c., surabaya, g., & internal, s. P. (2024). *Analisis sistem pengendalian internal terhadap persediaan barang operational engineering pada harris hotel & conventions gubeng surabaya*. 1, 1–10.
- Study, a. C. (2021). *Public sector asset management in the government of indonesia*. 13, 195–205.